

POTENSI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH

M. OKA ADNYANA MANIKMAS

Ahli Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial-Ekonomi Pertanian, Bogor

ABSTRACT

Small-medium scale entrepreneur is one of the economic sectors that have actively involved in developing Indonesia's economy. During the period of substantial economic growth especially in, 1980s and early 1990s that reach 7-8% per year, this sector was not given high priority by the government. However, this sector remains plays significant rule especially for labor absorption and rural economic development. When the economic crisis has devastating Indonesia's economy that started in July 1997, this small-medium entrepreneur came to action as the most survival and resilient economic sector. Its number continuously increases as well as its income and volume of business. Empirically, flexibility and resiliency of this sector to meet the impact of economic crisis has been proven. The results of integrative entrepreneur survey (survey usaha integratif, SUSI) conducted by CBS in 1998-1999 have showed these circumstances. This article tries to comprehensively discuss the profile of small-medium scale entrepreneur, its prospect, and the rule of science and technology to foster the development of this sector in the future and its policy implication.

Key words: Small-Medium Entrepreneur, Prospect, Regional Autonomy

PENDAHULUAN

Dalam lima tahun ke depan, GBHN mengamanatkan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan sektor ekonomi yang menggeluti usaha kecil-menengah. Pergeseran paradigma pembangunan ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang tertuang dalam UU 22 dan UU 25 tahun 1999, dimana otonomi berada pada wilayah Kabupaten dan Kota. Amanat GBHN tersebut antara lain menegaskan berbagai upaya pemerintah guna memacu pertumbuhan ekonomi berbasis sumberdaya lokal.

Pertama, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan; *Kedua*, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sesuai dengan kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah; *Ketiga*, memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing tinggi; *Keempat*, mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal; *Kelima*, mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah; *Keenam*, mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani; dan *Ketujuh*, mendayagunakan

sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang (Saragih, 2000).

Kebijakan nasional tentang otonomi daerah kepada Daerah Tingkat II tersebut akan berpengaruh sangat substansial dalam skenario penganggaran pembangunan dan peranan pemerintah pusat maupun daerah. Dalam waktu yang sama, perubahan lingkungan eksternal termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), komunikasi global, dan perkembangan pasar internasional akan sangat berpengaruh terhadap prioritas pembangunan ekonomi nasional. Kondisi seperti ini menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pelaku ekonomi untuk menemukan jalan keluarnya. Iptek yang merupakan salah satu sumberdaya akhirnya harus tampil ke depan untuk memberikan data dan informasi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun wilayah.

Usaha kecil dan usaha rumah tangga yang tidak berbadan hukum yang terdapat di semua sektor ekonomi merupakan usaha yang banyak memberikan lapangan usaha tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan tertentu maupun keahlian khusus. Secara nasional kontribusi jenis usaha ini terhadap produk domestik bruto sangat signifikan. Kebijakan pemerintah untuk memberi prioritas lebih besar dalam pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan utamanya usaha kecil dan rumah tangga maupun menengah menjadi cukup populer dan berdampak luas pada penyerapan tenaga kerja. Ke depan jenis usaha ini akan menjadi fondasi yang cukup kokoh bagi struktur ekonomi Indonesia.

PROFIL USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pembahasan tentang profil usaha kecil dan menengah (UKM) dibatasi hanya pada UKM yang tidak berbadan hukum. Jenis usaha ini sangat relevan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan yang terdesentralisasi, namun tetap mampu bersaing baik di pasar lokal maupun pasar internasional.

Jenis Usaha, Omset dan Pekerja

Jenis usaha yang termasuk ke dalam UKM terdiri dari: (1) pertanian dan yang terkait dengan pertanian (agribisnis), (2) pertambangan rakyat dan penggalian; (3) industri kecil dan kerajinan rumah tangga; (4) listrik non-PLN, (5) konstruksi; (6) perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan jasa komunikasi; (7) angkutan dan komunikasi; (8) lembaga keuangan; dan (9) real estate dan persewaan.

Secara keseluruhan jumlah usaha kecil dan menengah meningkat dari sekitar 1,411 juta buah tahun 1998 menjadi 1,452 juta buah tahun 1999 atau terjadi peningkatan sekitar 2,92%. Keadaan ini mencerminkan bahwa sektor ekonomi ini menjadi salah satu pilihan sebagai bidang usaha yang cukup menguntungkan dan relatif tahan terhadap tekanan

selama krisis ekonomi. Peningkatan jumlah usaha terjadi pada jenis usaha: (1) industri kecil dan kerajinan rumah tangga; (2) perdagangan besar, eceran, RM dan jasa akomodasi; (3) angkutan dan komunikasi, dan real estate dan persewaan. Sedangkan jenis usaha lainnya mengalami penurunan terutama: (1) pertambangan rakyat dan penggalian; (2) listrik non-PLN; dan (3) lembaga keuangan.

Peningkatan jumlah UKM terjadi masing-masing di wilayah Jawa dan Bali yaitu sekitar 5,85% diikuti oleh wilayah Kalimantan dan Sulawesi masing-masing meningkat sekitar 5,77% dan 2,32%. Sedangkan di wilayah lain jumlah UKM menurun cukup tajam terutama di wilayah Maluku dan Irija yaitu sekitar 69,07% (Tabel 1).

Sejalan dengan peningkatan jumlah UKM, secara keseluruhan jumlah pekerja yang terserap pada jenis usaha ini juga meningkat sekitar 2,47% dalam periode yang sama. Peningkatan penyerapan tenagakerja yang cukup tajam terjadi pada industri dan kerajinan rumah tangga yaitu 15,35%, begitu pula angkutan dan komunikasi. Sedangkan, penurunan jumlah pekerja yang cukup drastis terjadi pada usaha konstruksi dan lembaga keuangan.

Peningkatan penyerapan tenagakerja cukup tinggi terjadi di wilayah Kalimantan yaitu sekitar 10,32% pada periode 1998-1999. Sedangkan di wilayah Jawa dan Bali, dan Sulawesi terjadi peningkatan masing-masing 5,25% dan 3,28% pada periode yang sama (Tabel 2). Keadaan ini mencerminkan bahwa selama krisis, sektor ini berperan cukup besar dalam menyerap tenagakerja yang jumlahnya terus meningkat. Indikator ini menunjukkan bahwa UKM relatif lebih stabil dalam menghadapi tekanan yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Potensi ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk membangun basis ekonomi berkerakyatan yang kokoh.

Distribusi UKM antar wilayah mencerminkan bahwa jenis usaha ini masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Bali yaitu sekitar 9,586 juta atau 68,6% dari total UKM dan mampu menyerap tenagakerja sekitar 17,31 juta pada tahun 1998. Sedangkan pada tahun 1999, jumlah UKM di wilayah ini meningkat menjadi sekitar 10,15 juta dengan tenagakerja sekitar 18,232 juta. Namun secara nasional, rasio antara pekerja dan usaha masih relatif kecil yaitu hanya sekitar 1,85 pada tahun 1998 dan 1,84 pada 1999 (Tabel 3). Ini mencerminkan skala usaha secara rata-rata masih relatif kecil karena hanya mempekerjakan antara 1-2 tenagakerja. Namun demikian usaha kecil menengah ini telah terbukti yang paling *survive* selama krisis ekonomi.

Masih tetap sejalan dengan perkembangan UKM dan penyerapan tenagakerja yang meningkat cukup berarti, besarnya omset yang berputar pun secara umum meningkat cukup tajam yaitu sekitar 14,33% dalam periode 1998-1999. Kecuali di wilayah Maluku dan Irija, omset dari UKM di wilayah lainnya meningkat cukup signifikan. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi di wilayah Jawa dan Bali dan Kalimantan yaitu masing-masing sekitar 17,83% dan 26,15% dalam periode yang sama. Bila di lihat dari masing-masing jenis usaha, usaha

konstruksi walaupun jumlahnya berkurang namun perputaran omsetnya meningkat sangat tajam yaitu sekitar 112,02% (Tabel 4).

Nilai Produksi Bruto dan Pendapatan

Nilai produksi bruto dari UKM secara nasional meningkat sekitar 14,33% pada tahun 1999 dibandingkan dengan 1998. Pada periode yang sama, biaya antara pun meningkat sekitar 13,63% dan yang cukup mengembirakan adalah pembayaran upah dan gaji meningkat sekitar 26,71%. Ini mencerminkan bahwa sekalipun biaya antara dan upah serta gaji meningkat cukup substansial, tetapi nilai produksi bruto masih menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Kecuali wilayah Maluku dan Irija, upah dan gaji di wilayah lainnya seluruhnya meningkat mulai dari sekitar 11,17% di Sulawesi sampai pada yang tertinggi di Kalimantan dengan peningkatan sebesar 40,29%.

Di sisi lain, jumlah tenagakerja yang dibayar maupun yang tidak dibayar juga meningkat masing-masing sebesar 2,34% dan 2,51%. Secara agregat jumlah pekerja meningkat sekitar 2,47%. Penurunan jumlah tenagakerja yang menggantungkan hidupnya pada usaha kecil menengah terjadi di wilayah Maluku dan Irija (Tabel 5). Keadaan ini diperkirakan terjadi sebagai dampak kerusuhan yang terjadi di wilayah ini sampai sekarang belum terpecahkan secara tuntas.

Dari sisi pendapatan, UKM dikelompokkan menjadi delapan kelas pendapatan yaitu dari paling rendah <9 juta rupiah sampai yang tertinggi >500 juta rupiah per tahun (Tabel 6). Seluruh kelas pendapatan dari UKM mengalami peningkatan penerimaan pada tahun 1999 dibandingkan dengan 1998 kecuali kelas pendapatan > Rp 500 juta per tahun. UKM dengan kelas pendapatan yang terakhir ini mengalami penurunan pendapatan yang cukup tajam yaitu sekitar 53,76% dalam periode yang sama. Kondisi ini menunjukkan lagi, bahwa kelompok usaha kecil menengah relatif lebih kuat bertahan terhadap tekanan krisis ekonomi.

Permodalan

Modal usaha dari UKM terdiri atas tiga sumber yaitu: (1) milik sendiri, (2) sebagian dari pihak lain, (3) seluruhnya dari pihak lain dan (4) sumber lainnya. Secara agregat, kemampuan permodalan UKM sebagian besar mengandalkan modal sendiri. Pada tahun 1998 misalnya, dari sekitar 14,10 juta UKM ternyata sekitar 11,80 juta mengandalkan modal sendiri dan jumlah UKM ini kemudian meningkat menjadi sekitar 11,88 juta dari sekitar 14,52 juta UKM pada tahun 1999 atau terjadi peningkatan 0,71%. Sedangkan jumlah UKM yang mengandalkan sebagian dari modalnya dari pihak lain, juga meningkat cukup tajam yaitu sekitar 18,88% dalam periode yang sama. Di sisi lain, jumlah UKM yang sepenuhnya tergantung pada sumber modal dari pihak lain dan lainnya juga meningkat dengan cukup berarti yaitu masing-masing 6,35% dan 9,82% (Tabel 7).

Kecuali di wilayah Sumaterra, Maluku dan Irija, jumlah UKM yang mengandalkan modal sendiri dalam usahanya mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu masing-masing 2,75% di wilayah Jawa dan Bali, Nusa Tenggara 3,56%, Kalimantan 3,89% dan di wilayah Sulawesi sebesar 3,56% dalam periode 1998-1999. Dari Tabel 7 juga tampak bahwa jumlah UKM yang mendapat sumber permodalan baik milik sendiri, sebagian dari pihak lain, atau seluruhnya dari pihak lain maupun dari sumber lainnya menurun sangat tajam dan secara total jumlah UKM dilihat dari aspek permodalan menurun sekitar 67,29% dalam periode yang sama.

Masih terkait dengan aspek permodalan, asal modal pinjaman UKM antara lain: Bank, Koperasi, Lembaga Keuangan bukan Bank, Modal Ventura, Keluarga/Famili, Perorangan dan lainnya. Dilihat dari jumlah UKM yang ada, unit usaha yang memperoleh pinjaman dari Bank masih sedikit. Pada tahun 1998 misalnya, dari 14,10 juta UKM, hanya 480.239 UKM yang mendapat pinjaman dari Bank. Jumlah tersebut sedikit meningkat pada tahun 1999 yaitu 619.655 UKM dari jumlah 14,520 juta UKM pada tahun 1999 atau meningkat sekitar 29,03% dibandingkan dengan 1998 (Tabel 8). Dalam hal ini, peranan Bank, baik pemerintah maupun swasta relatif kecil dalam mendorong pengembangan usaha kecil menengah. Karena usaha skala seperti ini cukup tangguh menghadapi krisis, maka tidak ada alasan bagi sektor perbankan untuk tidak memberikan prioritas yang lebih besar pada UKM.

Namun patut menjadi catatan bagi pengembangan UKM ke depan bahwa jumlah UKM yang tidak memanfaatkan pinjaman masih sangat besar, baik pada tahun 1998 maupun 1999 yaitu masing-masing sekitar 11,96 juta dan 12,056 juta. Sedangkan jumlah UKM yang sudah memanfaatkan pinjaman dari berbagai sumber masing-masing hanya sekitar 2,142 juta UKM pada tahun 1998 dan sekitar 2,464 juta pada 1999 walaupun telah terjadi peningkatan sekitar 15,01%.

Dari jumlah UKM yang pernah memanfaatkan pinjaman dari berbagai sumber dapat dilihat pada Tabel 9. Dari total 2,142 juta UKM yang pernah memanfaatkan pinjaman pada tahun 1998, tampaknya sumber pinjaman dari keluarga, perorangan dan sumber lainnya lebih disukai dengan jumlah masing-masing 427.329 UKM, 654.151 UKM dan 579707 UKM, sedangkan UKM yang memanfaatkan dari sumber lainnya termasuk Bank masih rendah. Pada tahun 1999, jumlah UKM yang memanfaatkan pinjaman dari Bank cukup meningkat yaitu sekitar 22,40% dibandingkan dengan 1998. Namun demikian, ketiga sumber utama permodalan UKM di atas tetap menjadi andalan mereka.

Secara umum jumlah UKM yang memanfaatkan berbagai sumber modal tetap terbesar adalah di wilayah Jawa dan Bali, baik dari Bank maupun dari sumber modal lainnya termasuk keluarga dan perorangan. Sedangkan di wilayah lain jumlahnya tidak banyak, bahkan di wilayah Maluku dan Irija rata-rata jumlah UKM yang memanfaatkan modal pinjaman utama menurun cukup tajam.

Berbagai alasan yang dikemukakan oleh kelompok usaha kecil menengah untuk tidak meminjam modal usaha dari bank antara lain: (1) tidak tahu prosedur, (2) prosedur sulit, (3) tidak ada agunan, (4) suku bunga tinggi, (5) tidak berminat, dan (6) proposal untuk memperoleh pinjaman ditolak. Kelompok UKM yang tidak meminjam dari Bank dengan alasan tidak berminat jumlahnya cukup besar yaitu 1,031 juta UKM pada tahun 1998 dan menurun tajam menjadi 627.406 UKM pada 1999. Sungguh sulit untuk dijelaskan mengapa jumlah UKM yang tidak berminat untuk mendapatkan pinjaman dari Bank. Apakah ini terkait dengan alasan lainnya seperti tidak tahu prosedur, prosedur sulit atau tidak punya agunan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan pengkajian lebih jauh dan rinci. Hal ini sangat penting, karena ke depan sumber modal utama UKM diharapkan dari Bank. Karena berbagai alasan tersebut di atas, Jumlah UKM yang belum mau memanfaatkan modal pinjaman dari Bank menjadi sangat besar yaitu sekitar 3,756 juta UKM pada tahun 1998 dan menurun tajam pada 1999 yaitu sekitar 1,844 juta UKM (Tabel 10).

Dampak Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi yang mulai menimpa Indonesia pada Juli 1997 tampaknya tidak berpengaruh pada perkembangan UKM. Jumlah UKM terus meningkat rata-rata 2,99% dalam periode 1998-1999. Jumlah UKM yang mengatakan bahwa krisis ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja usahanya atau krisis tersebut dapat diatasi cukup besar, baik tahun 1998 maupun tahun 1999. Bahkan jumlah UKM pendatang baru yang beroperasi setelah Juli 1997-pun cukup besar yaitu sekitar 1,038 juta pada 1998 dan menjadi 1,757 juta tahun 1999 atau terjadi peningkatan sebesar 69,23% walaupun jumlah UKM yang telah beroperasi sebelum Juli 1997 sedikit menurun yaitu sekitar 2,28% (Tabel 11).

Distribusi UKM antar wilayah menunjukkan bahwa jumlah mereka rata-rata meningkat kecuali di wilayah Sumatera dan Maluku dan Irija. Peningkatan jumlah UKM yang cukup besar setelah krisis terjadi di wilayah Jawa dan Bali yaitu dari sekitar 9,586 juta pada 1998 menjadi 10,146 juta UKM pada 1999 atau sekitar 5,85%. Bahkan UKM yang telah beroperasi sebelum Juli 1997 yang mengatakan krisis ekonomi belum teratasi jumlahnya menurun tajam yaitu dari 2,473 juta pada tahun 1998 menjadi sekitar 1,694 juta UKM. Penurunan jumlah UKM ini mencerminkan bahwa sebagian dari mereka telah mampu mencari jalan keluar untuk mengatasi krisis yang menimpanya. Jumlah UKM yang beroperasi setelah Juli 1997 di wilayah ini pun meningkat tajam yaitu dari 612.410 pada tahun 1998 menjadi sekitar 1,054 juta UKM tahun 1999 atau peningkatan sekitar 72,04%.

Sedangkan distribusi UKM di wilayah lain berdasarkan dampak krisis ekonomi cukup beragam, namun jumlah mereka tidak terlalu besar. Walaupun demikian, jumlah UKM yang mengatakan bahwa dampak krisis ekonomi belum dapat di atasi jumlahnya menurun di seluruh wilayah. Kondisi ini dapat mengindikasikan dua hal yaitu: (1) sebagian dari mereka

memang telah mampu mengatasi dampak krisis ekonomi atau (2) sebagian dari mereka telah bangkrut. Untuk itu secara empiris kondisi ini perlu dikaji lebih lanjut (Tabel 11).

BPS juga melakukan kajian jangka pendek dengan menanyakan kinerja usaha UKM antara 1-3 bulan sebelum dilakukan survei. Hal ini dilakukan untuk menghindari bias bila *data recalling* dilakukan untuk waktu yang terlalu lama. Empat pertanyaan diajukan kepada masing-masing UKM yaitu lebih baik, sama saja, lebih buruk atau tidak dapat dibandingkan. Jumlah UKM yang mengatakan bahwa kondisi mereka sama saja dengan kondisi 1-3 bulan yang lalu tampaknya paling besar yaitu antara 10,05 juta – 10,66 juta UKM. Di sisi lain, jumlah UKM yang mengatakan kondisi mereka lebih baik pun cukup besar yaitu antara 2,052 juta – 2,960 juta dibandingkan dengan 1-3 bulan sebelumnya (Tabel 12).

Distribusi UKM antar wilayah pun menunjukkan distribusi yang sama yaitu jumlah UKM yang mengatakan kondisi mereka relatif sama dengan 1-3 bulan sebelumnya. Bahkan jumlah UKM yang tidak dapat membandingkan kondisi usaha mereka dengan waktu 1 bulan sebelumnya sangat kecil yaitu hanya 49 UKM. Kondisi ini mencerminkan bahwa hampir seluruh UKM mengerti dengan baik dampak krisis ekonomi terhadap perkembangan usahanya. Dengan demikian mereka dapat menyusun rencana ke depan dengan lebih hati-hati. Di sini tampak jelas bahwa kelompok usaha kecil menengah lebih tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi.

Prospek Usaha

Untuk melihat prospek pengembangan masing-masing jenis UKM, BPS juga melakukan analisis dengan menanyakan pertanyaan tentang kondisi usaha mereka tiga bulan ke depan. Sejalan dengan kondisi 1-3 bulan sebelumnya, sebagian besar UKM mengatakan bahwa kondisi usaha mereka dalam 3 bulan ke depan akan sama saja. Sekitar 67,19% mengatakan sama saja, lebih buruk 8,20% dan sekitar 24,61% mengatakan bahwa kondisi mereka akan lebih baik. Dari sekitar 14,520 juta UKM yang ada, sekitar 8,667 juta bergerak di bidang usaha perdagangan besar, eceran dan rumah makan dan sekitar 5,757 juta mengatakan bahwa kondisi mereka akan sama saja dalam tiga bulan ke depan. Jenis usaha lainnya yang jumlahnya juga cukup besar adalah industri kecil dan kerajinan rumah tangga, angkutan dan komunikasi dan masing-masing sekitar 65,82% dan 72,33% memperkirakan bahwa kondisi usaha mereka akan sama saja dalam 3 bulan ke depan (Tabel 13).

Begitu pula distribusi UKM antar wilayah berdasarkan prospek usaha dalam 3 bulan ke depan dimana sebagian besar mengatakan akan sama saja. Kondisi di wilayah Jawa dan Bali misalnya, dari sekitar 10,146 juta UKM yang ada, 66,91% memperkirakan kondisi usaha mereka akan sama saja, 25,22% lebih baik dan hanya 7,87% lebih buruk dalam 3 bulan ke depan. Kecenderungan yang sama juga terlihat di wilayah lainnya (Tabel 14).

Dari dua indikator di atas jelas menunjukkan bahwa baik antara wilayah maupun antar jenis usaha kondisi mereka akan sama saja dan lebih baik. Hanya sebagian kecil kondisinya akan lebih buruk dalam tiga bulan kedepan. Secara empiris, implikasi dari indikator tersebut adalah sektor usaha kecil menengah tidak perlu diragukan lagi bahwa mereka adalah sektor ekonomi yang paling lentur menghadapi tekanan krisis ekonomi. Oleh karena itu kebijakan pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kelompok usaha ini. Mereka tidak memerlukan BLBI, namun kontribusinya terhadap pemulihan ekonomi nasional ke depan dapat diandalkan.

STRATEGI PEMILIHAN TEKNOLOGI DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH

Teknologi adalah suatu cara melakukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis (Sahil dan Salim 1999). Manusia dengan kemampuan akal dan pikiran telah mampu mendorong penciptaan berbagai macam teknologi yang dibutuhkan. Dalam penerapannya, teknologi berkembang mengikuti aspek nilai tambah, efisien, praktis, ekonomis, atau pertimbangan produktivitas terutama kalau hal ini dikaitkan dengan kegiatan usaha produksi atau industri.

Faktor Dominan Bernilai Strategis

Dalam skala UKM, berbagai teknologi akan menjadi daya tarik dan teradopsi dengan berkelanjutan jika teknologi tersebut memiliki berbagai faktor seperti: (1) harga terjangkau oleh pengguna, (2) mempunyai nilai tambah dan manfaat, dan (3) biaya operasional dan pemeliharaan rendah. Dengan demikian, pertimbangan desain dan konstruksi harus dikawinkan dengan perhitungan kaji teknologi yang sesuai kebutuhan dan arti teknologi itu sendiri, sehingga menghasilkan barang yang kompetitif. Dengan kata lain, teknologi yang dihasilkan mampu bersaing termasuk harga dan kualitasnya.

Pendekatan Partisipasi dalam Perakitan Teknologi

Kata partisipasi mengacu pada kata ikut serta, peran aktif, peran serta, adanya kontribusi dan kerja sama. Selanjutnya kata partisipatif merupakan kata sifat dari partisipasi, sehingga mengandung sifat-sifat ikut serta, berperan aktif, memberikan kontribusi dan kerja sama. Partisipasi masyarakat merupakan sebuah proses dinamis (Banki, 1981) di mana semua anggota memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan kelompok, membagi manfaat dari hasil kegiatan kelompok, saling tukar informasi dan pengalaman kepentingan yang sama serta mengikuti seluruh aturan dan keputusan yang diambil oleh kelompok.

Mengapa partisipasi diperlukan dalam melakukan kegiatan pembangunan termasuk dalam proses pengkajian dan perakitan teknologi tepat guna?. Berikut adalah berbagai

alasanya bahwa pendekatan partisipatif sesuai dengan program pembangunan yang berbasis keunggulan sumberdaya lokal dengan mengandalkan teknologi yang bersifat spesifik lokasi (Cohen and Uphoff, 1977; Waddimba, 1979; CIRDAP, 1984; Mishra *et al.*, 1984; Oakley and Marsden, 1984):

- (1) Mengurangi biaya pembangunan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah;
- (2) Meningkatkan manfaat yang diperoleh masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan;
- (3) Seluruh komponen masyarakat dan pelaku ekonomi memperoleh manfaat;
- (4) Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga program akan menjadi lebih berlanjut dan masyarakat lebih percaya diri;
- (5) Memperoleh peluang dan penguasaan terhadap sumber daya;
- (6) Terdapat mobilisasi sumber daya lokal untuk pelaksanaan suatu program;
- (7) Pelaksanaan program akan lebih mudah dan lancar; dan
- (8) Partisipasi masyarakat akan menuju kepada pemberdayaan secara bertahap untuk kelompok-kelompok yang secara sosial ekonomi kurang beruntung.

Oleh karena itu, proses penciptaan dan perakitan teknologi secara partisipatif dapat diartikan sebagai kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi secara partisipatif. Artinya sejak dari identifikasi masalah sampai pada evaluasinya, proses tersebut melibatkan pelaku ekonomi. Berikut ini disajikan prinsip-prinsip partisipatif dalam proses penemuan suatu teknologi tetap guna (Bechstedt, 1997):

- (1) Analisis kondisi dan pemanfaatan sumber daya perlu diberi prioritas tinggi;
- (2) Perilaku, pandangan dan dasar kelompok usaha mengambil keputusan perlu dipelajari dan dipahami;
- (3) Pelaku dan pengguna teknologi perlu memainkan peran utama dalam menentukan subyek penelitian, dan dalam memilih dan menguji teknologi tepat guna;
- (4) Menjamin keberlanjutan teknologi secara jangka panjang;
- (5) Mengaplikasikan sistem secara holistik dan interdisiplin;
- (6) Menyikapi partisipatif sebagai proses pembelajaran yang berulang-ulang;
- (7) Mengikutsertakan semua pelaku usaha kecil menengah sejak awal.

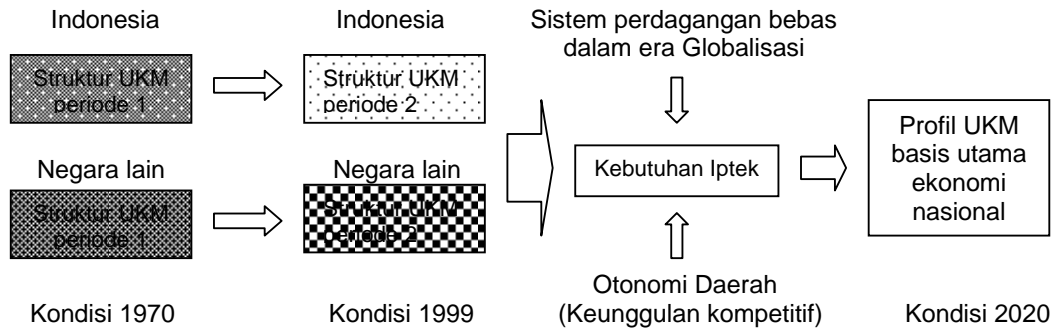
Filosofi pendekatan partisipatif dideskripsikan sebagai pendekatan dan metode yang mendorong pengguna teknologi mengambil bagian dalam menganalisis kondisi kehidupan mereka sendiri agar dapat membuat rencana yang lebih matang. Pada beberapa kasus, pendekatan partisipatif dimulai dengan orang luar dan apabila memungkinkan pengguna teknologi setempat mengambil bagian baik dalam pemahaman, analisis, tindakan, monitoring dan evaluasi. Apabila kelompok usaha kecil menengah dapat melakukan proses perencanaan dengan baik diharapkan hal ini akan membawa mereka lebih menguasai perputaran usahanya.

Manfaat yang dapat diperoleh dari proses penemuan teknologi tepat guna secara partisipatif antara lain: (1) Mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi yang mempunyai dimensi: (a) spesifik lokasi, (b) berorientasi pasar, (c) berorientasi pada kebutuhan pengguna, dan (d) teknologi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat; (2) Meningkatkan produksi dan pendapatan serta kehidupan yang lebih baik bagi usaha kecil menengah; dan (3) Mewujudkan perubahan persepsi, sikap dan tingkah laku dari pengguna PRA dalam melakukan litkaji.

Kebutuhan UKM Terhadap Teknologi

Dengan memperhatikan sisi permintaan dan potensi sumberdaya serta profil UKM sampai saat ini, maka dalam 20-25 tahun ke depan diperkirakan akan berkembang tiga kelompok UKM yang sangat prospektif yaitu: (1) komunikasi, (2) industri obat-obatan, dan (3) industri jasa. Kelompok usaha yang terakhir sangat sesuai ditangani oleh UKM karena berbagai alasan yaitu: (1) pengalaman selama ini menunjukkan bahwa industri komunikasi sangat efisien bila dijalankan oleh usaha skala kecil bahkan tingkat rumah tangga, (2) kecenderungan *miniaturisasi* yang terus berkembang dalam kecenderungan teknologi global (Halim dkk. 2001). Di sisi lain, kelompok usaha jasa lainnya seperti akomodasi (*home stay* dan rumah makan) dan transportasi wisata akan terus berkembang pesat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelompok usaha di bidang obat-obatan akan terus dipicu oleh meningkatnya kesadaran terhadap jenis obat yang ramah lingkungan di negara-negara maju dan kebutuhan obat-obatan alternatif di dalam negeri. Hal ini didorong oleh mahalnya obat-obatan kimia yang sebagian besar berbahan baku impor. Berdasarkan kondisi dalam negeri maupun global seperti inilah dapat diperkirakan akan terjadi perubahan struktur ke depan yang akan didominasi oleh tiga kelompok UKM di atas.

Kecenderungan kebutuhan UKM terhadap teknologi ke depan tidak dapat terlepas dari perubahan struktur UKM tersebut. Teknologi yang akan didesain, mulai sekarang harus sudah mempersiapkan permintaan yang sangat substansial dari industri komunikasi, obat-obatan, dan jasa berskala kecil maupun menengah untuk mendukung perkembangan UKM yang makin prospektif (Gambar 1).



Gambar 1. Kerangka Analisis Kebutuhan Teknologi dan Proail UKM ke depan.

PROSPEK PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah yang mulai diterapkan pada bulan Januari tahun 2001 sesuai dengan UU No. 22 dan UU 25 tahun 1999. Otonomi diberikan kepada wilayah kabupaten dan kota, sedangkan pemerintah provinsi adalah wakil pemerintah pusat yang tugasnya melakukan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Secara teoritis, ada enam elemen utama yang menjadi dasar pemerintah daerah yaitu: (1) urusan otonomi yang merupakan dasar kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, (2) kelembagaan yang merupakan wadah dari otonomi yang diserahkan kepada daerah, (3) pegawai dan staf yang mempunyai tugas untuk menjalankan otonomi, (4) sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah, (5) unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah, dan (6) manajemen pelayanan umum sebagai refleksi dari penyelenggaraan otonomi daerah (Suwandi, 2001). Keenam elemen di atas secara integrasi merupakan suatu sistem yang membentuk pemerintahan daerah. Penataan haruslah bersifat terpadu dan menyeluruh, karena pendekatan *piece-meal* yang selama ini dilakukan selalu menghasilkan *outcomes* yang kurang optimal.

Dalam era otonomi daerah, masing-masing wilayah didorong untuk memanfaatkan keunggulan sumberdaya lokal guna meningkatkan daya saing produk-produk yang dihasilkan oleh wilayah, baik pada pasar domestik maupun pasar internasional dengan paradigma *think locally but action globally*. Usaha kecil-menengah yang tumbuh subur di masing-masing wilayah kecuali wilayah Maluku dan Irija hendaknya memanfaatkan peluang dan momentum dalam era otonomi daerah. Mereka harus terus mengembangkan sayap usahanya di samping mendirikan UKM-UKM baru yang berdaya saing tinggi. Ke depan kelompok UKM yang merupakan sektor ekonomi andalan hendaknya memperhatikan antara

lain: (1) memiliki daya saing tinggi, (2) berkerakyatan, (3) dihela oleh ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, (4) terdesentralisasi dan menyebar lebih merata pada masing-masing wilayah, (5) menjadi motor penggerak roda pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian fondasi ekonomi Indonesia akan bertumpu pada usaha kecil-menengah tersebut.

Berdasarkan profile UKM selama tahun 1998-1999 berbagai prospek dan peluang yang tidaklah sulit untuk dimanfaatkan. UKM yang begitu solid dan tangguh dalam menghadapi tekanan krisis ekonomi selama tiga tahun terakhir telah mampu menunjukkan dirinya untuk dapat diandalkan sebagai *soko-guru* perekonomian nasional. Kemampuan menyerap tenaga kerja yang begitu besar juga merupakan sisi lain dari UKM untuk dapat berkiprah lebih besar dalam proses pemulihan ekonomi nasional.

Berbicara tentang distribusi pendapatan, pengembangan UKM akan mampu mendorong laju pemerataan pendapatan yang lebih adil. Pengalaman selama 30 tahun lebih dengan mendorong perkembangan industri dan usaha skala besar tanpa memberikan prioritas yang berarti kepada perkembangan UKM telah terbukti gagal membangun perekonomian Indonesia yang tangguh dari ancaman krisis ekonomi global. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah sudah waktunya untuk berpaling kepada jenis usaha kecil-menengah ini. Pengembangan UKM yang progresif dimungkinkan karena berbagai faktor yaitu: (1) sebagian besar UKM mengandalkan bahan baku lokal untuk mengembangkan usahanya, (2) tidak memerlukan sumberdaya manusia yang terlatih dan terspesialisasi tinggi, (3) pengembangan teknologi yang bersifat spesifik lokasi akan membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing, (4) sebagian besar produk maupun jasa yang dihasilkan tidak memerlukan *hi-tech*, dan (5) fluktuasi nilai tukar dollar Amerika terhadap rupiah tidak mempengaruhi proses produksi karena berbahan baku lokal, bahkan merupakan *blessing in disguise* terutama UKM yang berorientasi ekspor.

Hasil SUSI 1999 menunjukkan bahwa, prospek usaha dari UKM yang tidak berbadan hukum dalam tiga bulan kedepan pada tahun 1999 cukup prospektif. Sekitar 67,19% mengatakan bahwa kondisi mereka sama saja dengan tiga bulan sebelumnya, 24,61% mengatakan akan lebih baik, dan hanya 8,20% dari seluruh UKM yang mengatakan bahwa kondisi mereka akan lebih buruk. Kondisi ini merupakan indikasi bahwa ke depan UKM akan makin berkembang sesuai dengan kondisi dan keunggulan masing-masing daerah. Dengan demikian perekonomian Indonesia akan sangat tergantung pada kinerja pembangunan ekonomi di tingkat wilayah.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

1. UKM merupakan sektor ekonomi yang telah terbukti cukup tangguh dan telah menjadi penyangga terakhir dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia dari kebangkrutan. Jenis usaha ini juga dapat menampung cukup banyak tenaga kerja dan menjadi sumber pendapatan pemerintah daerah yang cukup besar.
2. Sektor ini juga relatif lentur menghadapi dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan yang belum pulih. Usaha skala besar boleh merasakan pahit-getirnya krisis ekonomi sebagai akibat dari perlakuan pemerintah yang protektif kepada mereka tetapi tidak bagi UKM.
3. Ke depan, jenis usaha yang tidak berbadan hukum ini akan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Pengembangan UKM memiliki keunggulan karena pengembangan usahanya berbasis pada sumberdaya lokal dan sangat sedikit tergantung pada bahan baku impor.

Implikasi Kebijakan

1. Pengembangan *low external input sustainable small-medium entrepreneur* (LEISSE) hendaknya mendapat prioritas yang besar dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai terobosan antara lain: (1) membuka akses langsung dan luas bagi mereka ke sumber modal khususnya Perbankan, (2) menyederhanakan prosedur pengajuan modal usaha ke Bank, (3) melakukan pembinaan dalam upaya konsolidasi manajemen usaha agar lebih kompetitif, (4) *capacity building* melalui pelatihan dan magang, dan (5) penciptaan teknologi tepat guna secara partisipatif dengan melibatkan mereka sejak perencanaan, desain, uji-coba dan evaluasi hasil.
2. Membentuk bank khusus yang melayani kebutuhan modal UKM atau mereka distimulir untuk membentuk Bank sendiri. Pengalaman Bangladesh dapat dijadikan referensi bagaimana mereka membentuk Gamin Bank untuk melayani usaha kecil-menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous 2000. Monitoring dan Evaluasi Penelitian, Pengkajian dan Diseminasi di BPTP. Laporan Monev Tim Asistensi Badan Litbang Pertanian 1999-2000.
- Anonimous. 1998. Profil Usaha kecil menengah tidak berbadan hukum, Indonesia. Survei Usaha Terintegrasi, BPS Jakarta.
- Anonimous. 1999. Profil Usaha kecil menengah tidak berbadan hukum, Indonesia. Survei Usaha Terintegrasi, BPS Jakarta.
- Banki, E.S. 1981. Dictionary of Administration and Management. Los Angeles, California: System Research Institute.
- Bechstedt, H.D. 1997. Training Manual on Participatory Rural Appraisal. GTZ.
- CIRDAP. 1984. People's Participation in Rural Development: An Overview of South and South East Asian Experiences. Center on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific. Comilla, Bangladesh.
- Cohen, J. M., and N. T. Uphoff. 1977. Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation. Rural Development Monograph No. 2. Rural Development Committee, Center for International Studies, Cornell University, Ithaca, New York.
- Mishra, S. N., K. Sharma and N. Sharma. 1984. Participation and Development, NBO Publisher's Distributor. New Delhi.
- Oakley, P and D. Marsden. 1984. Approaches to Participation in Rural Development. Published on Behalf of the ACC Task Force on Rural Development.
- Omar, H; A. Kuswono; I. Brahmantio; T. Fizzanty; and L.E. Mustika. 2001. Teknologi pada usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia: Kondisi saat ini dan kebutuhan mendatang. Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri, ITB.
- Sahil, M.R dan T. Salim. 1999. Strategi pemilihan teknologi untuk pengembangan UKM (bahan diskusi). Materi Pelatihan Alih Teknologi di Daerah Pedesaan. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna, LIPI.
- Suwandi, M. 2001. Implikasi penyerahan BPTP kepada pemerintah daerah. Makalah disampaikan pada Raker Badan Litbang Pertanian 28-29 Nopember 2001, Jakarta.
- Waddimba, J. 1979. Some Participatory Aspects of Programmes to Involve the Poor in Development. United Nations Institute for Social Development, Geneva.

Tabel 1. Banyaknya usaha tidak berbadan hukum menurut wilayah dan lapangan usaha 1998-1999.

WILAYAH		Pertam. Rakyat & penggalian	Indust. kecil & kerajinan RT	Listrik non-PLN	Konstruksi	Perdagangan bsr, ecer, RM & js.akomodasi	Angkutan & komunikasi	Lembaga keuangan	Real estat, persewaan	Total
SUMATERA	1998	13085	286516	2622	29512	1494542	216477	902	241397	2285053
	1999	6540	308339	1427	24245	1396647	213183	161	232026	2182568
	PERUBAHAN (%)	-50.02	7.62	-45.58	-17.85	-6.55	-1.52	-82.15	-3.88	-4.49
JAWA DAB BALI	1998	91343	1468429	635	22757	5830039	1163078	3184	1006248	9585713
	1999	78781	1730571	856	13303	6030215	1257563	3214	1031842	10146345
	PERUBAHAN (%)	-13.75	17.85	34.80	-41.54	3.43	8.12	0.94	2.54	5.85
NUSA TENGGARA	1998	7311	152270	334	9481	228804	35396	467	24566	458629
	1999	14900	169004	509	8823	208444	40717	377	22574	465384
	PERUBAHAN (%)	103.80	10.99	52.40	-6.94	-8.90	15.03	-19.27	-8.11	1.47
KALIMANTAN	1998	22015	97237	290	14483	414367	80995	121	71138	700646
	1999	21393	123511	559	16126	424154	81667	213	73431	741054
	PERUBAHAN (%)	-2.83	27.02	92.76	11.34	2.36	0.83	76.03	3.22	5.77
SULAWESI	1998	5810	172945	922	14872	557365	96552	79	63825	912370
	1999	8216	177214	1074	15879	571699	98930	27	60470	933509
	PERUBAHAN (%)	41.41	2.47	16.49	6.77	2.57	2.46	-65.82	-5.26	2.32
MALUKU DAN IRJA	1998	3334	19502	135	2765	109032	9051	33	12739	165591
	1999	893	6177	0	810	35410	3873	13	4041	51217
	PERUBAHAN (%)	-73.22	-68.33	-100.00	-70.71	-67.52	-57.21	-60.61	-68.28	-69.07
TOTAL	1998	142898	2196899	4938	93870	8634149	1601549	4786	1419913	14108002
	1999	130723	2514816	4425	79186	8666569	1695933	4005	1424384	14520077
	(%)	-8.52	14.47	-10.39	-15.64	0.38	5.89	-16.32	0.31	2.92

Sumber BPS 1998-1999 (diolah).

Tabel 2. Banyaknya Pekerja Pada Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Wilayah dan Lapangan Usaha 1998-1999.

WILAYAH	Pertambangan Rakyat & Penggalian	Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	Listrik Non PLN	Konstruksi	Perdagangan Besar.Eceran.& RM Serta Jasa Akomodasi	Angkutan dan Komunikasi	Lembaga Keuangan	Real Estat. Usaha Persewaan. dan Jasa-jasa	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMATERA: 1998	28995	737283	4814	108491	2950032	272328	3355	407169	4512467
1999	12302	777583	2143	76011	2720307	279160	672	406481	4274659
PERUBAHAN (%)	-57.57	5.47	-55.48	-29.94	-7.79	2.51	-79.97	-0.17	-5.27
JAWA DAN BALI 1998	144812	3608903	1242	101552	10289643	1406692	11657	1741905	17306406
1999	131548	4307789	1256	39448	10472881	1525284	10656	1742941	18231803
PERUBAHAN (%)	-9.16	19.37	1.13	-61.15	1.78	8.43	-8.59	0.06	5.35
NUSA TENGGARA: 1998	12540	318312	565	38087	389365	63430	1193	45651	869143
1999	32567	322396	1061	29920	362215	59721	1162	40888	849930
PERUBAHAN (%)	159.70	1.28	87.79	-21.44	-6.97	-5.85	-2.60	-10.43	-2.21
KALIMANTAN: 1998	74469	207390	451	44754	811872	103602	302	113725	1356565
1999	70432	288377	1241	41758	865338	103598	1075	124769	1496588
PERUBAHAN (%)	-5.42	39.05	175.17	-6.69	6.59	0.00	255.96	9.71	10.32
SULAWESI: 1998	12319	382792	1436	62434	991039	133976	232	112875	1697103
1999	13875	402157	1836	54107	1028463	134729	58	117615	1752840
PERUBAHAN (%)	12.63	5.06	27.86	-13.34	3.78	0.56	-75.00	4.20	3.28
MALUKU DAN IRJA 1998	6450	47518	984	11605	224713	15390	33	22344	329037
1999	1766	17967	0	1756	74120	6684	26	7719	110038
PERUBAHAN (%)	-72.62	-62.19	-100.00	-84.87	-67.02	-56.57	-21.21	-65.45	-66.56
TOTAL 1998	279585	5302198	9492	366923	15656664	1995418	16772	2443669	26070721
1999	262490	6116269	7537	243000	15523324	2109176	13649	2440413	26715858
PERUBAHAN (%)	-6.11	15.35	-20.60	-33.77	-0.85	5.70	-18.62	-0.13	2.47

Sumber BPS 1998-1999 (diolah).

Tabel 3. Banyaknya usaha tidak berbadan hukum dan pekerja menurut wilayah serta perkembangannya tahun 1998-1999.

WILAYAH	1998				1999				Perkembangan 1998-1999 (%)		Rasio Pekerja per Usaha	
	Usaha		Pekerja		Usaha		Pekerja		Usaha	Pekerja	1998	1999
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMATERA	2285053	16.35	4512467	17.48	2182568	15.03	4274659	16.00	-4.49	-5.27	1.97	1.96
JAWA DAN BALI	9585713	68.60	17306406	67.04	10146345	69.88	18231803	68.24	5.85	5.35	1.81	1.80
NUSA TENGGARA	433898	3.10	818598	3.17	465348	3.20	849930	3.18	7.25	3.83	1.89	1.83
KALIMANTAN	700646	5.01	1356565	5.26	741054	5.10	1496588	5.60	5.77	10.32	1.94	2.02
SULAWESI	912370	6.53	1697103	6.57	933509	6.43	1752840	6.56	2.32	3.28	1.86	1.88
MALUKU & IRIJA	56575	0.40	122705	0.48	51217	0.35	110038	0.41	-9.47	-10.32	2.17	2.15
TOTAL	13975255	100.00	26813844	100.00	14520041	100.00	26715858	100.00	3.90	3.49	1.85	1.84

Sumber BPS 1998-1999 (diolah).

Tabel 4. Besarnya Omset pada Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Wilayah dan Lapangan Usaha (000 Rp) 1998-1999.

WILAYAH	Pertambangan Rakyat & Penggalian	Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	Listrik Non PLN	Konstruksi	Perdagangan Besar.Eceran. & RM Serta Jasa Akomodasi	Angkutan dan Komunikasi	Lembaga Keuangan	Real Estat. Usaha Persewaan. dan Jasa-Jasa	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMATERA 1998	107.846.454	7.662.744.248	88.212.520	337.705.346	20.586.210.120	2.846.775.363	6.159.077	2.787.101.573	34.422.754.699
1999	68.738.745	7.205.693.989	11.090.403	856.227.960	20.582.826.505	3.493.812.403	3.045.348	3.287.272.896	35.508.708.247
PERUBAHAN (%)	-36.26	-5.96	-87.43	153.54	-0.02	22.73	-50.56	17.95	3.15
JAWA DAN BALI 1998	384.322.837	30.110.568.935	4.776.658	337.478.820	71.155.158.352	11.994.397.125	47.430.251	10.183.796.294	124.217.929.271
1999	427.637.911	36.488.035.022	3.201.472	329.660.003	83.608.615.297	14.244.636.997	43.993.653	11.226.327.239	146.372.107.594
PERUBAHAN (%)	11.27	21.18	-32.98	-2.32	17.50	18.76	-7.25	10.24	17.83
N. TENGGARA 1998	19.918.638	1.040.833.558	495.120	46.380.265	1.963.038.726	602.044.994	1.130.587	410.647.648	4.084.489.532
1999	31.339.154	1.425.161.078	2.957.055	82.912.980	2.249.805.518	458.246.593	5.730.839	229.065.905	4.485.219.121
PERUBAHAN (%)	57.34	36.92	497.24	78.77	14.61	-23.88	406.89	-44.22	9.81
KALIMANTAN 1998	1.089.953.466	1.981.124.846	915.137	152.283.101	5.853.656.086	1.294.126.940	6.972.186	779.678.276	11.158.711.026
1999	1.027.003.543	3.129.126.663	3.766.191	526.086.134	7.059.098.779	1.313.031.959	12.495.283	1.006.342.700	14.076.951.251
PERUBAHAN (%)	-5.78	57.95	311.54	245.47	20.59	1.46	79.22	29.07	26.15
SULAWESI 1998	53.813.327	3.023.038.353	4.132.310	137.882.642	4.491.958.185	1.240.790.138	2.184.600	678.381.882	9.632.199.436
1999	105.038.739	2.642.420.908	4.165.286	392.088.503	5.367.183.324	1.445.143.828	1.051.208	888.097.409	10.845.189.204
PERUBAHAN (%)	95.19	-12.59	0.80	184.36	19.48	16.47	-51.88	30.91	12.59
MALUKU & IRJA 1998	14.028.944	332.723.420	14.423.760	27.039.206	1.386.867.101	191.711.199	99.000	153.171.974	2.120.955.603
1999	8.779.080	170.955.434	0	15.354.190	566.336.126	78.345.252	52.000	102.875.361	942.697.443
PERUBAHAN (%)	-37.42	-48.62	-100.00	-43.22	-59.16	-59.13	-47.47	-32.84	-55.55
TOTAL 1998	1.669.901.653	44.151.033.360	112.955.505	1.038.759.380	105.436.888.599	18.169.845.759	64.866.700	14.992.777.647	185.637.038.572
1999	1.668.537.172	51.061.393.093	25.180.407	2.202.329.768	119.433.865.549	21.033.217.033	66.368.330	16.739.981.510	212.230.872.861
PERUBAHAN (%)	-0.08	15.65	-77.71	112.02	13.28	15.76	2.31	11.65	14.33

Tabel 5. Banyaknya Usaha. Pekerja. Nilai Produksi Bruto. Biaya Antara dan Upah Gaji Menurut wilayah 1998-1999.

WILAYAH	Banyaknya Usaha	TenagaKerja (orang)			Nilai Produksi Bruto (Ribuan Rupiah)	Biaya Antara (Ribuan Rupiah)	Upah dan Gaji (Ribuan Rupiah)	
		Dibayar	Tidak Dibayar	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	
SUMATERA	1998	2.285.053	862.650	3.649.817	4.512.467	34.422.754.699	13.122.619.623	1.962.617.472
	1999	2.182.568	773.481	3.501.178	4.274.659	35.508.708.247	14.386.925.381	2.253.847.248
	PERUBAHAN (%)	-4.49	-10.34	-4.07	-5.27	3.15	9.63	14.84
JAWA DAN BALI	1998	9.585.713	3.497.783	13.808.623	17.306.406	124.217.929.271	57.229.513.413	7.855.021.383
	1999	10.146.345	3.706.309	14.525.494	18.231.803	146.372.107.594	66.164.287.409	10.279.770.839
	PERUBAHAN (%)	5.85	5.96	5.19	5.35	17.83	15.61	30.87
NUSA TENGGARA	1998	458.629	146.249	722.894	869.143	4.084.489.536	1.488.312.187	205.670.553
	1999	465.348	115.670	734.260	849.930	4.485.219.121	1.555.782.792	239.668.733
	PERUBAHAN (%)	1.47	-20.91	1.57	-2.21	9.81	4.53	16.53
KALIMANTAN	1998	700.646	249.424	1.107.141	1.356.565	11.158.710.026	4.063.371.039	664.643.584
	1999	74.154	304.706	1.191.882	1.496.588	14.076.951.251	5.249.301.913	932.429.311
	PERUBAHAN (%)	-89.42	22.16	7.65	10.32	26.15	29.19	40.29
SULAWESI	1998	912.370	321.435	1.375.668	1.697.103	9.632.199.436	3.508.613.113	585.381.786
	1999	933.509	329.519	1.423.321	1.752.840	10.845.189.204	3.801.261.992	650.742.616
	PERUBAHAN (%)	2.32	2.51	3.46	3.28	12.59	8.34	11.17
MALUKU & IRJA	1998	156.591	47.566	281.471	329.037	2.120.955.603	749.040.115	102.582.608
	1999	51.217	15.394	94.644	11.038	942.697.443	303.842.903	58.520.326
	PERUBAHAN (%)	-67.29	-67.64	-66.38	-96.65	-55.55	-59.44	-42.95
Jumlah	1998	14.099.002	5.125.107	20.945.614	26.070.721	185.637.038.572	80.491.469.590	11.375.907.387
	1999	14.520.041	5.245.079	21.470.779	26.715.858	212.230.872.861	91.461.402.390	14.414.979.074
	PERUBAHAN (%)	2.99	2.34	2.51	2.47	14.33	13.63	26.71

Sumber BPS 1998-1999 (diolah).

Tabel 6. Banyaknya Usaha Tidak Berbadan Hukum Menurut Wilayah dan Besar Penerimaan/Pendapatan 1998-1999.

WILAYAH	Penerimaan /Pendapatan (Juta Rupiah)								Jumlah
	< 9	10 - 24	25-49	50-99	100-199	200-299	300-499	500 +	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUMATERA 1998	2105302	122336	37974	13197	4727	684	276	557	2285053
1999	2002485	121321	37630	15482	3791	950	464	445	2182568
PERUBAHAN (%)	-4.88	-0.83	-0.91	17.31	-19.80	38.89	68.12	-20.11	-4.49
JAWA DAN BALI 1998	9066724	335125	113947	50948	13018	2649	1664	1638	9585713
1999	9485507	437106	137156	61361	14652	5050	5051	462	10146345
PERUBAHAN (%)	4.62	30.43	20.37	20.44	12.55	90.64	203.55	-71.79	5.85
NUSA TENGGARA 1998	437303	15932	2319	2593	56	414	12	0	458629
1999	443052	15895	4603	1125	275	398	0	0	465348
PERUBAHAN (%)	1.31	-0.23	98.49	-56.61	391.07	-3.86	-100.00		1.47
KALIMANTAN 1998	645892	41002	9373	3379	926	74	0	0	700646
1999	684466	41735	8476	3709	1978	210	372	108	74154
PERUBAHAN (%)	5.97	1.79	-9.57	9.77	113.61	183.78			-89.42
SULAWESI 1998	868854	29288	9804	3335	441	51	597	0	912370
1999	888071	33894	8414	1802	1328	0	0	0	933509
PERUBAHAN (%)	2.21	15.73	-14.18	-45.97	201.13	-100.00	-100.00		2.32
MALUKU & IRJA 1998	149372	5539	964	656	0	0	60	0	156591
1999	48100	2687	386	44	0	0	0	0	51217
PERUBAHAN (%)	-67.80	-51.49	-59.96	-93.29			-100.00		-67.29
Jumlah 1998	13273447	549222	174381	74108	19168	3872	2609	2195	14099002
1999	13551681	652638	196665	83523	22024	6608	5887	1015	14520041
PERUBAHAN (%)	2.10	18.83	12.78	12.70	14.90	70.66	125.64	-53.76	2.99

Sumber BPS 1998-1999 (diolah).

Tabel 7 . Banyaknya Usaha Tidak Berbadan Hukum Menurut Wilayah dan Sumber Kepemilikan Modal 1998-1999.

Propinsi		Milik Sendiri	Sumber Kepemilikan Modal			TOTAL
			Sebagian dari Pihak Lain	Seluruhnya dari Pihak Lain	Lainnya	
1		2	3	4	5	6
SUMATERA	1998	1970517	197607	84608	32321	2285053
	1999	1873247	197734	84595	26992	2182568
		-4.94	0.06	-0.02	-16.49	-4.49
JAWA DAN BALI	1998	7951576	1029052	507772	97313	9585713
	1999	8170081	1307252	538653	130359	10146345
		2.75	27.03	6.08	33.96	5.85
NUSA TENGGARA	1998	373090	68636	13706	3198	458629
	1999	386356	60715	14565	3712	465348
		3.56	-11.54	6.27	16.07	1.47
KALIMANTAN	1998	601586	72882	19669	6509	700646
	1999	625001	86766	26906	2381	741054
		3.89	19.05	36.79	-63.42	5.77
SULAWESI	1998	766463	98821	31813	15273	912370
	1999	783293	104188	37657	8371	933509
		2.20	5.43	18.37	-45.19	2.32
MALUKU DAN IRJA	1998	136736	13156	4357	2342	156591
	1999	46183	2927	1549	558	51217
		-66.22	-77.75	-64.45	-76.17	-67.29
TOTAL	1998	11799968	1480154	661924	156956	14099002
	1999	11884161	1759582	703925	172373	14520041
		0.71	18.88	6.35	9.82	2.99

Sumber BPS 1998-1999 (diolah).

Tabel 8. Banyaknya usaha tidak berbadan hukum menurut wilayah dan asal pinjaman 1998-1999.

Wilayah	Banyaknya Usaha	Tidak memanfaatkan Pinjaman	Memanfaatkan Pinjaman	Asal Modal Pinjaman							
				Bank	Koperasi	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Modal Ventura	Keluarga/Famili	Perorangan	Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
SUMATERA	1998	2.285.053	2.002.838	282.215	55.123	17.198	7.869	2.851	85.942	109.472	59.561
	1999	2.182.568	1.900.239	282.329	69.263	18.184	10.282	3.496	117.805	59.559	73.497
PERUBAHAN (%)		-4.49	-5.12	0.04	25.65	5.73	30.66	22.62	37.08	-45.59	23.40
JAWA DAN BALI	1998	9.585.713	8.048.889	1.536.824	356.279	70.221	68.071	8.380	341.096	561.244	453.050
	1999	10.146.345	8.300.440	1.845.905	467.136	102.129	101.123	11.293	650.550	319.720	657.191
PERUBAHAN (%)		5.85	3.13	20.11	31.12	45.44	48.56	34.76	90.72	-43.03	45.06
NUSA TENGGARA	1998	458.629	376.288	82.341	20.081	6.922	5.440	247	25.732	18.724	29.467
	1999	465.348	390.068	75.280	22.266	8.121	4.568	273	18.962	19.558	21.594
PERUBAHAN (%)		1.47	3.66	-8.58	10.88	17.32	-16.03	10.53	-26.31	4.45	-26.72
KALIMANTAN	1998	700.646	608.095	92.551	10.624	5.128	1.262	419	31.129	38.230	20.378
	1999	741.054	627.382	113.672	21.887	5.021	3.284	1.050	45.161	34.141	25.050
PERUBAHAN (%)		5.77	3.17	22.82	106.01	-2.09	160.22	150.60	45.08	-10.70	22.93
SULAWESI	1998	912.370	781.736	130.634	35.474	8.865	2.182	166	34.582	43.485	26.727
	1999	933.509	791.664	141.845	37.496	12.752	7.840	791	55.845	32.992	23.859
PERUBAHAN (%)		2.32	1.27	8.58	5.70	43.85	259.30	376.51	61.49	-24.13	-10.73
MALUKU & IRJA	1998	156.591	139.078	17.513	2.658	1.819	784	628	5.818	5.060	4.259
	1999	51.217	46.741	4.476	1.607	581	43	0	1.396	716	646
PERUBAHAN (%)		-67.29	-66.39	-74.44	-39.54	-68.06	-94.52	-100.00	-76.01	-85.85	-84.83
TOTAL	1998	14.099.002	11.956.924	2.142.078	480.239	110.153	85.608	12.691	524.299	776.215	593.442
	1999	14.520.041	12.056.534	2.463.507	619.655	146.788	127.140	16.903	889.719	466.686	801.837
PERUBAHAN (%)		2.99	0.83	15.01	29.03	33.26	48.51	33.19	69.70	-39.88	35.12

Sumber BPS 1998-1999 (diolah).

Tabel 9 . Banyaknya Usaha Tidak Berbadan Hukum yang Pernah Memanfaatkan Pinjaman Menurut Wilayah dan Asal Modal Pinjaman Utama 1998-1999.

Wilayah		Asal Modal Pinjaman Utama							Jumlah
		Bank	Koperasi	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Modal Ventura	Keluarga/ Famili	Perorangan	Lainnya	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
SUMATERA	1998	38026	12404	4486	2095	75613	91275	57316	282215
	1999	44035	10836	5516	1497	100815	50331	69299	282329
PERUBAHAN	(%)	15.80	-12.64	22.96	-28.54	33.33	-44.86	20.91	0.04
JAWA DAN BALI	1998	234606	54090	48086	5695	268537	478951	446859	1536824
	1999	300210	57114	53656	5786	562807	255872	610460	1845905
PERUBAHAN	(%)	27.96	5.59	11.58	1.60	109.58	-46.58	36.61	20.11
NUSA TENGGARA	1998	15054	5666	3244	82	18565	13581	16158	82341
	1999	15009	6190	3869	152	15041	16388	18631	75280
PERUBAHAN	(%)	-0.30	9.25	19.27	85.37	-18.98	20.67	15.31	-8.58
KALIMANTAN	1998	7533	4595	992	207	28505	31150	19570	92551
	1999	13354	4184	2329	823	39163	30863	22956	113672
PERUBAHAN	(%)	77.27	-8.94	134.78	297.58	37.39	-0.92	17.30	22.82
SULAWESI	1998	28836	7135	2321	262	31595	35430	25055	130634
	1999	25545	8722	5740	332	51270	29672	20564	141845
PERUBAHAN	(%)	-11.41	22.24	147.31	26.72	62.27	-16.25	-17.92	8.58
MALUKU & IRJA	1998	2174	2245	659	408	4514	3764	3749	17513
	1999	1129	581	43	0	1396	681	646	4476
PERUBAHAN	(%)	-48.07	-74.12	-93.47	-100.00	-69.07	-81.91	-82.77	-74.44
TOTAL	1998	326220	86135	59787	8749	427329	654151	579707	2142078
	1999	399282	87627	71153	8590	770492	383807	742556	2463507
PERUBAHAN	(%)	22.40	1.73	19.01	-1.82	80.30	-41.33	28.09	15.01

Sumber BPS 1998-1999 (diolah).

Tabel 10. Banyaknya Usaha Tidak Berbadan Hukum menurut Wilayah dan Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank 1998-1999.

WILAYAH	Meminjam dari Bank	Tidak Meminjam dari Bank	Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank						
			Tidak Tahu Prosedur	Prosedur Sulit	Tidak Ada Agunan	Suku Bunga Tinggi	Tidak Berminat	Proposal Ditolak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SUMATERA	1998	63172	751567	124719	131150	165322	155751	174625	-
	1999	69263	21366	36171	29005	61993	26005	57962	1930
	PERUBAHAN (%)	10	-97	-71	-78	-63	-83	-67	-
JAWA DAN BALI	1998	311247	2341989	393737	258665	604327	380133	705491	-
	1999	467136	1378769	208972	135409	391911	123788	510361	8328
	PERUBAHAN (%)	50	-41	-47	-48	-35	-67	-28	-
NUSA TENGGARA	1998	18830	165933	49666	25090	38428	19256	33493	-
	1999	22266	53014	13147	7328	16551	5008	10343	637
	PERUBAHAN (%)	18	-68	-74	-71	-57	-74	-69	-
KALIMANTAN	1998	15496	196730	47257	19740	37456	44921	47356	-
	1999	22	91785	15198	11803	24250	14151	26112	271
	PERUBAHAN (%)	-100	-53	-68	-40	-35	-68	-45	-
SULAWESI	1998	33647	266402	59846	38990	60345	46181	61040	-
	1999	37	104349	28293	20970	19345	12919	22082	740
	PERUBAHAN (%)	-100	-61	-53	-46	-68	-72	-64	-
MALUKU DAN IRJA	1998	5693	33415	7714	6794	4815	5500	8592	-
	1999	2	2869	1424	441	442	16	546	-
	PERUBAHAN (%)	-100	-91	-82	-94	-91	-100	-94	-
Jumlah	1998	448085	3756036	682575	480429	910693	651742	1030597	-
	1999	619655	1843852	303205	204956	514492	181887	627406	11906
	PERUBAHAN (%)	38	-51	-56	-57	-44	-72	-39	-

Sumber BPS 1998-1999 (diolah).

Tabel 11. Banyaknya Usaha Tidak Berbadan Hukum Menurut Wilayah dan Dampak Krisis Ekonomi 1998-1999.

WILAYAH	Dampak Krisis pada Perusahaan Yang Beroperasi Sebelum Juli 1997						Beroperasi Setelah Jun-97	TOTAL
	Tidak Berpengaruh	Dapat Diatasi	Belum Teratasi	Mengalami Penirngkatan	Tidak Tahu	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUMATERA 1998	347.498	1.041.529	562.312	40.925	84.417	2.076.681	208.372	2,285,053
1999	302.997	969.954	392.314	40.122	109.373	1.814.760	367.808	2,182,568
PERUBAHAN (%)	-12.81	-6.87	-30.23	-1.96	29.56	-12.61	76.52	-4.49
JAWA DAN BALI 1998	1.676.430	4.263.250	2.472.912	137.512	423.199	8.973.303	612.410	9,585,713
1999	1.955.553	4.777.367	1.693.729	160.767	505.333	9.092.749	1.053.596	10,146,345
PERUBAHAN (%)	16.65	12.06	-31.51	16.91	19.41	1.33	72.04	5.85
NUSA TENGGARA 1998	87.828	190.809	91.633	26.312	22.674	419.256	39.373	458,629
1999	87.381	205.793	58.633	25.917	26.981	404.705	60.643	465,348
PERUBAHAN (%)	-0.51	7.85	-36.01	-1.50	19.00	-3.47	54.02	1.47
KALIMANTAN 1998	101.342	367.862	132.756	14.453	25.376	641.789	58.857	700,646
1999	11.571	356.538	9.377	20.100	35.848	620.634	120.420	741,054
PERUBAHAN (%)	-88.58	-3.08	-92.94	39.07	41.27	-3.30	104.60	5.77
SULAWESI 1998	168.497	465.740	104.184	24.290	45.557	808.268	104.102	912,370
1999	166.454	458.290	79.842	17.411	65.762	787.759	145.750	933,509
PERUBAHAN (%)	-1.21	-1.60	-23.36	-28.32	44.35	-2.54	40.01	2.32
MALUKU DAN IRJA 1998	33.892	78.736	17.163	2.736	8.642	141.169	15.422	156,591
1999	5.294	27.858	5.634	1.070	2.079	41.935	9.282	51,217
PERUBAHAN (%)	-84.38	-64.62	-67.17	-60.89	-75.94	-70.29	-39.81	-67.29
TOTAL 1998	2.415.487	6.407.926	3.380.960	246.228	609.865	13.060.466	1.038.536	14,099,002
1999	2.632.750	6.795.800	2.323.229	265.387	745.376	12.762.542	1.757.499	14,520,041
PERUBAHAN (%)	8.99	6.05	-31.28	7.78	22.22	-2.28	69.23	2.99

Sumber BPS 1998-1999 (diolah).

Tabel 12. Banyaknya Usaha Tidak Berbadan Hukum menurut Propinsi Dan Keadaan Usaha dibandingkan Satu, Dua, Tiga bulan yang lalu

WILAYAH	Dibandingkan tiga bulan yang lalu				Dibandingkan dua bulan yang lalu				Dibandingkan satu bulan yang lalu			
	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	Tidak dapat dibandingkan	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	Tidak dapat dibandingkan	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	Tidak dapat dibandingkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMATERA	286.668	1.546.381	311.105	38.414	280.483	1.619.205	260.779	22.101	378.946	1.551.701	251.921	-
JAWA DAN BALI	1.427.896	7.190.260	1.362.996	165.193	1.497.268	7.388.657	1.176.508	83.912	2.091.815	6.953.191	1.101.339	-
NS. TENGGARA	85.563	318.410	38.796	22.579	86.254	339.829	26.244	13.021	107.141	324.119	34.088	-
KALIMANTAN	103.697	530.915	88.289	18.153	117.754	551.111	60.455	11.734	166.738	511.613	62.703	-
SULAWESI	142.589	691.611	61.718	37.591	130.498	719.303	54.128	29.580	204.930	676.807	51.623	149
MALUKU & IRJA	6.489	41.924	2.435	369	10.311	38.343	2.312	251	10.029	36.389	4.799	-
Jumlah	2.052.9020	10.319.501	1.865.339	2.822.991	2.122.568	10.656.448	1.580.426	1.605.991	2.959.599	10.053.820	1.506.473	149

Sumber BPS 1998-1999 (diolah).

Tabel 13. Banyaknya usaha tidak berbadan hukum menurut lapangan usaha dan prospek usaha pada 3 bulan yang akan datang 1999.

Lapangan Usaha	Prospek Usaha pada 3 bulan yang akan datang						TOTAL	
	Lebih buruk		Sama saja		Lebih baik		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Pertambangan Rakyat Dan Penggalan	25.887	19.80	76.083	58.20	28.753	22.00	130.723	100
2 Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	238.284	9.48	1.655.320	65.82	621.212	24.70	2.514.816	100
a. TenagaKerja 1-4	217.200	9.49	1.528.117	66.75	543.935	23.76	2.289.252	100
b. TenagaKerja 5-19	21.084	9.35	127.203	56.39	77.277	34.26	225.564	100
3 Listrik Non PLN	998	22.55	2.889	65.29	538	12.16	4.425	100
4 Konstruksi	9.096	11.49	53.725	67.85	16.365	20.67	79.186	100
5 Perdagangan Besar. Eceran dan Rumah Makan serta Jasa Akomodasi	651.332	7.52	5.756.782	66.43	2.258.455	26.06	8.666.569	100
6 Angkutan dan Komunikasi	162.442	9.58	1.226.686	72.33	306.805	18.09	1.695.933	100
7 Lembaga Keuangan	71	1.77	2.544	63.52	1.390	34.71	4.005	100
8 Real Estat. Usaha Persewaan & Jasa-jasa	102.904	7.22	982	68.94	339.512	23.84	1.424.384	100
TOTAL	1.191.014	8.20	9.755.997	67.19	3.573.030	24.61	14.520.041	100

Sumber BPS 1998-1999 (diolah).

Tabel 14. Banyaknya usaha tidak berbadan hukum menurut propinsi dan prospek pada 3 bulan yang akan datang 1999.

Wilayah	Prospek usaha pada 3 bulan yang akan datang						Jumlah	
	Lebih Buruk		Sama saja		Lebih baik			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUMATERA	260.798	11.95	1.496.809	68.58	424.961	19.47	2.182.568	100
JAWA DAN BALI	798.995	7.87	6.788.721	66.91	2.558.629	25.22	10.146.345	100
NUSA TENGGARA	24.022	5.16	301.954	64.89	139.372	29.95	465.348	100
KALIMANTAN	49.638	6.70	517.984	69.90	173.432	23.40	741.054	100
SULAWESI	53.328	5.71	619.500	66.36	260.681	27.92	933.509	100
MALUKU DAN IRIAN JAYA	4.233	8.26	31.029	60.58	15.955	31.15	51.217	100
Jumlah	1.191.014	8.20	9.755.997	67.19	3.573.030	24.61	14.520.041	100

Sumber BPS 1998-1999 (diolah).